



Grafis: Harian Jogja/Hengki Irawan Sumber: DPUPKP Kota Jogja (OTO)

► Halaman 10

Air Tanah...

Data DPUPESD DIY menyebut rata-rata permukaan air tanah di DIY berada pada kedalaman 6,555 meter pada Juli lalu. Kedalaman air permukaan tanah tersebut berkurang menjadi 6,863 meter dan pada September lebih dalam lagi menjadi 6,925 meter.

"Kalau dikalkulasi rata-rata penurunan air tanahnya sebanyak 37 sentimeter tiap bulan sejak Juli sampai September kemarin. Kondisi ini masih wajar menurut perhitungan kami, faktor penyebabnya masih karena musim kemarau," katanya.

Kota Jogja menjadi wilayah dengan penurunan permukaan air tanah paling banyak. Sumur di Kota Jogja rata-rata kedalamannya 9,48 meter pada Juli lalu dan tambah dalam menjadi 9,85 meter pada Agustus, lalu semakin dalam pada September dengan kedalaman 9,48 meter.

Kabupaten Bantul menjadi wilayah yang paling minim mengalami penurunan permukaan air tanah. Berdasarkan data DPUPESD DIY merekam pada Juni sumur-sumur di Bantul kedalamannya 3,61 meter, kedalamannya meningkat pada Agustus menjadi 4,01 meter, lalu naik lagi jadi 4,25 meter sebulan kemudian. Yanu menerangkan permukaan air tanah Kota Jogja cenderung lebih dalam karena kepadatan penduduk. "Semakin padat wilayahnya dengan luasan yang terbatas, kebutuhan airnya juga tinggi," ujarnya.

Kepala DPUPESD DIY Anna Rina Herbranti menjelaskan instansinya terus berupaya mengendalikan permukaan air tanah agar kuantitasnya terus terjaga. "Pengendalian ini terutama dengan perizinan penggunaan air tanah untuk industri," katanya, Kamis.

Anna menjelaskan seluruh perizinan penggunaan air tanah di Bumi Mataram mesti mendapat izin dari Badan Geologi. "Perizinan itu termasuk berapa yang diperkenankan untuk diambil airnya, jadi pengendaliannya di situ," terangnya.

Meskipun perizinan ada di Badan Geologi, jelas Anna, jawabannya juga kerap melakukan tinjauan lapangan. "Kami koordinasikan dengan Badan Geologi juga, karena perizinan ini memang baru dipindahkan ke Pusat. Jadi kalau ada yang melanggar perizinan kami berikan surat peringatan," ujarnya.

Pengendalian air tanah juga dilakukan dengan Nilai Peran Air Tanah (NPA). "NPA ini menyangkut pajak penggunaan air tanah, semakin banyak yang diambil maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan."

Mekanisme pajak itu, menurut Anna, akan membatasi dunia usaha mengambil air tanah di Bumi Mataram.

Sumur Resapan

Salah satu langkah untuk mengatasi penurunan permukaan air tanah adalah dengan membangun sumur resapan. Saat ini di Kota Jogja sudah ada 2.740 unit sumur resapan dengan total panjang 27.400 meter. *(selengkapnya lihat grafis)*

"Penambahan terus kami lakukan tiap tahun karena itu sudah ada perda yang memerintahkan setiap pembangunan 60 meter persegi yang menutup tanah wajib disertai dengan satu sumur resapan," jelas Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Jogja Rahmawan Kurniadi, Kamis.

Tujuan penambahan sumur resapan itu, kata Kurniadi, untuk memastikan permukaan air tanah di Jogja terjaga. "Karena dengan sumur resapan ini air hujan akan terjaga di bawah air, tidak langsung terbuang ke aliran sungai," ujarnya.

Kurniadi tak dapat memastikan seberapa berdampaknya pembangunan sumur resapan terhadap penurunan permukaan air tanah. "Pengawasan dan pengendalian air tanah kewenangan provinsi dan Pusat," katanya.

Dibanding kan menutup tanah dengan konblok, menurut Kurniadi, sumur resapan lebih efektif menjaga permukaan air

tanah. "Karena konblok juga ada kemungkinan air itu tetap lari ke sungai atau dataran rendah lain bukan berhenti di lokasi itu, jadi kalau memungkinkan kami sarankan untuk bangun sumur resapan," ujarnya.

Air Tanah

Sementara itu, pakar manajemen air Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Maryono menerangkan kemarau panjang jelas berpengaruh pada turunnya permukaan air tanah. Suplai dari air hujan yang sudah habis membuat peresapan tanah sangat minim, sehingga air tanah berkurang drastis.

Faktor kedua, jelas Agus, ialah berkaitan dengan berkurangnya luas permukaan lahan hijau, terutama di daerah perkotaan. Ketika lahan hijau berkurang, peresapan air tanah juga akan minim. Faktor yang ketiga berkaitan dengan kondisi air tanah saat ini yang sudah digunakan secara berlebihan karena bertambahnya jumlah penduduk. "Pemanfaatan air tanah itu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Orang yg menggunakan air sumur itu terus-menerus bertambah," ujar Agus kepada *Harian Jogja*, Kamis.

Kemudian, perkembangan pemukiman yang semakin cepat juga membuat area peresapan di daerah hulu berkurang. Di samping itu, proyek pelurusan sungai dan pembangunan talut yang membuat air di hulu cepat mengalir ke hilir juga menjadi salah satu faktor penurunan permukaan air tanah. "Kondisi ini bukan baru saja terjadi sekarang, tapi sudah sejak 10 tahun lalu ketika ada isu Jogja Asat. Dipengaruhi El Nino juga, ada penurunan drastis sampai di beberapa tempat orang harus menurunkan dasar sumur," kata dia.

Solusinya, lanjut Agus, pemerintah daerah perlu mewajibkan setiap rumah, terutama di perkotaan, harus punya sumur resapan air hujan. "Bukan cuma sumur resapan saja, tapi sumur resapan air hujan ya," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005